

Pelaksanaan Pelayanan Publik di Bidang Pendidikan sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah di Kabupaten Gowa

Nur Ichsansukma¹, Ahkam Jayadi²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email Koresponden: Nurichsansukma24@gmail.com

Abstract

The main problem of this research is how public services in the field of education in Gowa Regency. The subject matter is then included in several subproblems or research questions, namely: 1) how is the implementation of the public in the field of education as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency?, 2) What are the factors that affect the performance of the Education Office in implementing public services as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency?. The results of this study indicate that: 1) Public implementation in the field of Education as the implementation of regional autonomy policies in Gowa Regency is good because the government first designs all programs that will be carried out later. 2) The factors that influence the performance of the Gowa Regency Education Office in carrying out the implementation of regional autonomy are due to several factors including the organizational structure factor and the public service apparatus.

Keywords: Education Sector; Public Service; Regional Autonomy.

Abstrak

Pokok Masalah Penelitian ini adalah bagaimana pelayanan public di bidang Pendidikan di Kabupaten Gowa. Pokok masalah tersebut selanjutnya dimasukkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan public dibidang Pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Gowa? 2) Apa factor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan dalam melaksanakan pelayanan public sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Gowa?. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pelaksanaan public di bidang Pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah dikabupaten Gowa sudah bagus karena terlebih dahulu pemerintah melakukan rancangan segala program yang akan dilakukan nantinya. 2) Faktor yang mempengaruhi kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa dalam menjalankan pelaksanaan implementasi otonomi daerah dikarenakan beberapa factor diantaranya dalah factor struktur organisasi dan aparat pelayanan public.

Kata Kunci: Bidang Pendidikan; Pelayanan Publik; Otonomi Daerah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Bidang pendidikan ini menjadi penting untuk dikaji. Sebab, bidang ini dianggap krusial dalam upaya mendorong kapabilitas manusia (Human Capital) dan oleh karena itu pemerintah di negara-negara berkembang terus berupaya untuk meningkatkan anggaran terhadap bidang tersebut. Studi burci menemukan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap upaya “perlawanan” terhadap kerentanan pangan di wilayah pedesaan di negara-negara berkembang dan dengan demikian merupakan kunci ketahanan pangan wilayah tersebut.

Mengacu pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional pasal 45 menyatakan bahwa “Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.

Hal ini sering dilihat terdapatnya perbedaan antara lembaga pendidikan yang berada di pelosok daerah kepulauan dengan lembaga pendidikan yang berada di kota besar yang memiliki sarana dan prasarana yang lengkap. Di sinilah sering terjadinya diskriminasi dan persaingan tidak seimbang antar lembaga pendidikan. Seharusnya pemerintah dalam hal ini mengambil suatu tindakan untuk mengatasi kesenjangan tersebut agar kesenjangan tersebut dapat diatasi dan kualitas, kepuasan serta mutu pendidikan dapat terjaga dari mulai daerah terpencil, kepulauan sampai kota-kota besar sehingga dapat bersaing dengan negara-negara lainnya.

METODE

Metode penelitian adalah suatu cara alami untuk mendapatkan dan memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum data yang didapat digunakan sebagai upaya dalam memecahkan masalah, memahami dan memecahkan masalah. Maksudnya untuk memperjelas informasi yang sebelumnya tidak diketahui menjadi tahu serta meminimalkan masalah sekaligus menghilangkan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Bidang Pendidikan Sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gowa

Pelayanan publik adalah tujuan dari penyediaan barang dan jasa. Penyediaan barang dan jasa yang dilakukan untuk mencapai tujuan dan misi Negara. Tujuan misi negara biasanya di atur dalam konstitusi atau peraturan perundangan lainnya. Contoh Pelayanan untuk memenuhi tujuan dan misi negara adalah pelayanan publik dibidang pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Setiap warga negara memiliki hak dan kebutuhan dasar yang harus dijamin pemenuhannya oleh Negara.

Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Dalam penulisan ini peneliti hanya meneliti pelayanan publik dalam bidang pendidikan.

Untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di kabupaten gowa maka penulis melakukan penelitian di kantor Dinas Pendidikan melalui wawancara.

Dr. Salam M. Pd dalam wawancara mengatakan bahwa pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan pemerintah terlebih dahulu melakukan rancangan untuk segala program yang

akan dilakukan nantinya. Perlu kita ketahui bahwa peran pendidikan adalah memasyarakatkan idiologi dan nilai-nilai sosio-kultura bangsa dan mempersiapkan tenaga kerja untuk memerangi kemiskinan kebodohan dan dorongan perubahan sosial, juga untuk pemeratakan kesempatan dan pendapatan.

Dr. Salam M. Pd juga mengatakan bahwa pelayanan dibidang pendidikan merupakan salah satu bidang pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan. Pelayanan di bidang pendidikan menjadi salah satu prasarat utama bagi masyarakat luas yang menempuh usia sekolah dimanapun dia berada. Dinas pendidikan sampai saat ini sudah berupaya melaksanakan kegiatan pelayanan di bidang pendidikan. Hanya saja yang menjadi kendala adalah masih buruknya minat sekolah anak-anak dan itu menjadi tanggungjawab masyarakat dan keluarga untuk menyekolahkan anak-anak mereka.

Dalam bidang pendidikan di kabupaten Gowa pemerintah juga berupaya menerapkan berbagai inovasi diantaranya sejak Tahun 2008 sampai sekarang pemerintah telah sukses menerapkan sistem pendidikan gratis dan sistem kelas berkelanjutan, yang dimana sistem ini tidak mengenal istilah tinggal kelas. Yang ada hanya tuntas tidaknya seorang siswa dalam menyelesaikan studinya.

Dr. Salam M. Pd juga menambahkan bahwa dalam sistem tersebut juga dikenal adanya penghapusan pekerjaan rumah (PR) bagi siswa. Dimana hal ini, pemkab Gowa sudah merumuskan dalam bentuk peraturan daerah tentang sistem kelas tuntas berkelanjutan (SKTB). Penghapusan PR itu sendiri terintegrasi dalam SKTB. Jadi, penghapusan PR itu bukan hal baru, karena telah dilaksanakan pada program SKTB. Dalam wawancaranya juga menegaskan bahwa jika sejumlah kebijakan kementerian pendidikan sekarang ini, banyak diadopsi dari SKTB. Misalnya, Ujian Nasional bukan lagi satu-satunya penentu kelulusan siswa.

Pemberian tugas memang merupakan bagian integral dalam sebuah sistem pembelajaran. Salah satu model pembelajaran yang dikembangkan di Gowa adalah project Based Learning, yang mengembangkan kompetensi Psikomotorik anak. Metode pemberian tugas tersebut telah diubah melalui games (Bermain), sehingga anak tidak merasa sedang mengerjakan tugas. Awalnya SKTB ini diterapkan di semua jenjang tingkatan sekolah. Dari SD sampai SMA dan SMK. Tapi semenjak SMA dan SMK beralih ke Provinsi, maka penerapannya tingkat SD dan SMP saja.

Dr. Salam M. Pd mengatakan bahwa pemerintah juga memberikan kebijakan dengan adanya program investasi ¼ Abad atau investasi sumber daya manusia 25 tahun jenjang S1. Yang dimana pemerintah memberikan beasiswa untuk putra putri terbaik dari daerah kabupaten Gowa ke jenjang Universitas terbaik di Indonesia tanpa harus terikat dan kembali untuk mengabdikan ke tanah Gowa. Dimana mereka bebas berkarya dan memilih daerah yang di inginkan. Dan adanya program Satpol PP untuk seluruh sekolah yang ada di kabupaten Gowa guna untuk penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum.

2. *Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Dinas Pendidikan Dalam Melaksanakan Pelayanan Publik Sebagai Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Di Kabupaten Gowa*

Dr. Salam M. Pd mengatakan bahwa ada beberapa indikator yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan tugas dinas pendidikan itu sendiri, dengan adanya indikator tersebut maka Kepala Dinas Pendidikan memiliki dasar untuk memantau kinerja dari setiap bidang. Dalam wawancara Dr. Salam M, Pd juga mengatakan bahwa dalam melaksanakan satu tugas program kerja, setiap bidang dituntut harus menyelesaikan program kerjanya sesuai tugas dan fungsinya masing-masing. Namun terkhusus pada bidang pendidikan dasar seluruh program kerja yang dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Misalnya untuk program kerja perencanaan kebutuhan pendidik kami selalu berusaha memaksimalkan program kerja tersebut agar sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan namun meskipun begitu tidak bisa di pungkiri ada beberapa program kerja yang terkadang sedikit melenceng dari sasarannya. Dalam penyelesaian program kerja itu sendiri haru jelas tujuan yang ditetapkan, namun ada beberapa kendala yang biasanya terjadi dalam menyelesaikan pekerjaan tersebut dikarenakan tidak bisa diatas semua.

Dr. Salam M. Pd juga mengatakan bahwa dari segi kualitas kinerja Dinas Pendidikan sudah cukup baik dilihat bahwasanya selama beberapa tahun banyak program yang sudah terlaksana disetiap bidang. Namun tidak bisa dipungkiri bahwasanya dalam pelaksanaannya juga disetiap bidang mungkin banyak kendala namun itu bisa teratasi dan juga jarang terdapat keluhan dari staf mengenai program kerja yang dirasa cukup sulit, staf pada setiap bidang juga sudah ditempatkan sesuai dengan keahliannya masing-masing jadi saya rasa kinerja organisasi itu sudah cukup bagus.

Tolak ukur dari kinerja dinas pendidikan itu sendiri adalah dengan terselenggaranya program kerja selama periode satu tahun sebelum pertanggungjawaban itu dibuat, dan apakah program kerja tersebut dengan maksud dan tujuannya. Adapun kendala yang menghambat dalam proses pelaksanaan program kerja adalah lambatnya dana yang cair pada saat program kerja yang membutuhkan biaya untuk dilaksanakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pelayanan publik adalah :

a. Faktor struktur organisasi

Kualitas pelayanan publik pada pemerintah salah satunya bergantung pada komponen – komponen pembentuknya. Kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi. Dari sinilah terbentuk mekanisme koordinasi formal serta pola interaksi dalam sebuah organisasi. Kompleksitas berarti struktur organisasi tersebut menerapkan tingkat pembagian kerja, dan tingkat jabatan. Komponen formalisasi berkaitan dengan standard operating procedure (SOP). Terakhir, sentralisasi berkaitan dengan kewenangan pengambilan keputusan. Kondisi ketiga komponen struktur organisasi inilah yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik pemerintah. Apabila pemerintahan memiliki pembagian kerja yang sesuai kebutuhan. Memiliki SOP yang jelas untuk tiap jenis pelayanannya. Serta penerapan desentralisasi yang bertanggungjawab sehingga pengambilan keputusan dapat lebih cepat dan fleksibel. Tentu dapat menunjang kualitas pelayanan publik.

b. Faktor Aparat/ pelayanan publik

Sebagai pelaksana kegiatan dan proses penyelenggaraan pemerintahan. Kemampuan aparatur pemerintah ini turut pula berperan penting dalam menentukan tingkat kualitas pelayanan publik pemerintah. Bagaimana pemerintah mengelola dan membekali aparat sebagai sumber daya manusia yang dimiliki sehingga pemerintahan dapat memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

c. Sistem Pelayanan Publik

Untuk memberikan pelayanan publik yang baik bagi masyarakat dibutuhkan sistem yang tertata. Selain berimbas pada kecepatan pelayanan, sistem pelayanan publik yang baik dapat menekan pungli dan tindak korupsi. Syarat pelayanan yang jelas, batas waktu, prosedur, serta tarif pelayanan yang transparan dapat mendorong tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pelayanan publik di bidang pendidikan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di kabupaten gowa sudah bagus. Karena pemerintah gowa sudah menjalankan beberapa program dalam bidang pendidikan dan itu sudah berjalan beberapa tahun. Seperti pendidikan gratis yang sudah terealisasi dan sangat membantu masyarakat terutama siswa/siswi yang sedang menempuh pendidikannya.

Faktor yang mempengaruhi kinerja dinas pendidikan dalam melaksanakan pelayanan publik sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah di kabupaten gowa adalah kurangnya komunikasi kepala sekolah, guru dan orangtua siswa yang mengakibatkan siswa/siswi msaih banyak yang belum mengetahui program kerja terutama seperempat abad.

DAFTAR REFERENSI

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Peneliti Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi revisi VI; Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Chalid, Pheni , *Otonomi Daerah: Masalah, Pemberdayaan, dan Konflik*, Jakarta : Kemitraan, 2005
- Darumurti , Krishna D, *Otonomi Daerah Perkembangan Pemikiran dan Pelaksaan Bandung*: Citra Aditya Bakti, 2000
- Fajar , *Menyongsong, Otonomi Daerah*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UI, 2002
- Gaffar, Abdul, Karim, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Held, David, *Demokrasi dan Tatanan Global: Dari Negara Modern Hingga Pemerintahan Kosmopolitan*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung: Nusa Media, Cetakan I, 2009.
- Hamidi, Jazim, *Legislatif Drafting*, Yogyakarta: Total Media, 2011.
- Moenir, *Manajemen Pelayanan umum di Indonesia*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1995
- Marbun, *Otonomi Daerah 1945-2010 Proses dan Realita: Perkembangan Otonomi Daerah, Sejak zaman Kolonial sampai saat ini*, h. 20
- Muhajirin, Noen, *Metode Penelitian Kualitatif* , Yogyakarta: Reka Sarasin, 1998
- Miles, MathewB. dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, Jakarta: UI press 1992
- Poltak, Lijan Sinambela, *Reformasi pelayanan Publik: Teori, Kebijakan, dan Implementasi* Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Shiddiq, Mhd, *perkembangan pemikiran dalam ilmu hukum*, jakarta: pradya paramita, 2003
- Sobirin Malim, *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti Undang-Undang Dasar 1945*, Yogyakarta: UII Press, 2001
- Worotikan, Ian, *Otonomi Daerah: Peluang dan Tantangan*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Makhfudz, M, *Kontroversi Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Hukum Vol. 3 No.2, Fakultas Hukum Universitas TamaJagakarsa,
- Gunawan dkk, *Otonomi Daerah Pemikiran Wilayah*, dalam artikel Jamaluddin Hos, *Otonomi Daerah: Antara Cita dan Fakta*, Kendari: Fisip Universitas Haluoleo Press, 2005.